BERSAMA KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH

# Akhir Tahun, Enam Camat Dirotasi dan Dilantik

**SLEMAN (KR)** - Sebanyak 46 PNS terdiri dari jabatan tinggi pratama, pejabat administrator, pengawas sekolah dan kepala sekolah dilantik dan diambil sumpah janji oleh Bupati Sleman Kustini di Pendapa Parasamya Kantor Setda Sleman, Rabu (27/12).

Pelantikan ditandai dengan penandatanganan pakta integritas oleh PNS terlantik dan Bupati Sleman disaksikan Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Aji Wulantara dan Kepala BKPP Sleman, R Budi Pramono.

Pejabat yang dilantik di antaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Haris Martapa. Kepala Bakesbangpol Indra Darmawan, Staf Ahli Bupati Anton Sujarwo. Kemudian ada enam panewu yang dilantik yakni Panewu Turi Bara Hernowo, Panewu Minggir Djoko Muljanto, Panewu Kalasan Joko Susilo, Panewu Sleman Sumariyah, Panewu Ngemplak Dakiri dan Panewu Gamping Tamsiz Sarwana.

Menurut Bupati, rotasi dan promosi merupakan sebuah dinamika perkembangan organisasi dan sebuah proses yang harus diselenggarakan secara terus menerus sebagai serangkaian perubahan menuju organisasi yang lebih baik. "Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini harus dimaknai sebagai pemicu peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat, menggerakkan roda pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kita sesuai amanah dan tupoksi masing-masing," ujarnya.

Bupati juga mengajak para pejabat terlantik untuk berkomitmen dan mempersembahkan versi terbaik dalam menjalankan tanggung jawab yang akan diemban. "Terakhir saya berpesan kepada seluruh pejabat terlantik hari ini untuk tetap istiqomah menjadi integritas, jadilah pemimpin ideal berbekal prinsip Guna Titi Purun yang bermakna kemampuan, kecermatan dan kehendak dalam

mengabdi kepada masyarakat, menuju Sleman yang sejahtera dan bermartabat," jelasnya. **(Has)-f**

KR-Istimewa

*Bupati Kustini melantik enam panewu dan pejabat lainnya.*

MEDSOS UBAH GAYA KOMUNIKASI

# Selama 4 Tahun, Transaksi E-Commerce Naik 500%

**SLEMAN (KR)** - Perkembangan media sosial sebagai alat pemasaran telah mengubah gaya komunikasi antara perusahaan dengan konsumen termasuk cara berbagi informasi produk dan merek ke konsumen. Bahkan pemasaran media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterikatan konsumen dan minat beli.

"Tidak mengherankan bila selama empat tahun terakhir, transaksi e-commerce di Indonesia meningkat hingga 500%," tandas promovendus Dosen Universitas Cokroaminoto Yogya Rinaldi ST MBA dengan referensi Wartaekonomi 2019 ketika mempertahankan disertasi di FBE UII, Rabu (27/12). Dengan promotor Prof Dr Suyanto MM dan co-promotor I Anas Hidayat MBA PhD dan II Prof Dr Tony Wijaya mempertahankan disertasi berjudul 'Prediktor Minat Beli Online Dan Perilaku Beli Online Produk Keterlibatan Tinggi'.

Dikatakan Rinaldi, adopsi internet yang cepat dalam aktivitas perdagangan dimotivasi oleh keuntungan bagi pemasok dan konsumen. "Namun terdapat fenomena kontradiktif dalam perilaku pembelian online konsumen, saat belanja online semakin populer, banyak sekali calon konsumen yang justru memutuskan untuk membatalkan pembeliannya pada tahap pembayaran," tandasnya.

Artinya, peningkatan nilai transaksi e-commerce tersebut tidak diikuti dengan peningkatan rasio penyelesaian transaksi online. Baymard Institute, tahun 2019, merilis data rasio pengabaian transaksi, yang rata-rata 70%, selama empat tahun terakhir. "Artinya, 7 dari 10 konsumen yang berada di tahap pembayaran akhirnya tidak menyelesaikan transaksi.

Sebelumnya Doktor lulusan FBE ke-127 menyebutkan, pada era digital yang terus berkembang, perilaku konsumen telah mengalami perubahan dramatis. Salah satu aspek yang menonjol adalah pertumbuhan perilaku belanja online yang pesat, hal ini mempengaruhi cara konsumen berinteraksi dengan merek dan produk. Fenomena tersebut menjadi semakin menarik ketika melihatnya dari perspektif produk keterlibatan tinggi yang semakin digandrungi. **(Fsy)-f**

# Tiga Raperda Disahkan Jadi Perda

**SLEMAN (KR)** - Bupati Sleman Kustini dan Wakil Bupati Danang Maharsa menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Sleman ke 18 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 di kantor DPRD Kabupaten Sleman, Rabu (27/12). Agenda rapat paripurna kali ini yakni penyampaian laporan hasil rapat kerja dalam rangka sinkronisasi terhadap tiga Raperda, yaitu Raperda fasilitasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan prekusor narkotika, Raperda pendidikan karakter dan Raperda penyelenggaraan metrologi.

Agenda rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan Permohonan Persetujuan DPRD, penandatanganan persetujuan bersama (MoU), serta penyampaian pendapat Akhir Bupati.

Wakil Ketua DPRD Sleman Tri Nugroho menjelaskan, sebelumnya telah dilakukan rapat kerja dalam rangka sinkronisasi atas tiga Raperda antara Bupati Sleman dengan DPRD pada hari Jumat (22/12). Adapun hasil dari rapat tersebut seluruh fraksi sependapat dengan jawaban Bupati Sleman dan Bupati Sleman juga sependapat dengan jawaban DPRD.

"Namun ada beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti. Di antaranya, satu, judul Raperda Pendidikan Karakter diubah menjadi Penguatan Pendidikan Karakter. Dua, judul Raperda Penyelenggaraan Meteorologi diubah menjadi Penyelenggara Meteorologi Legal. Tiga, setelah Raperda ini ditetapkan agar Bupati Sleman berkoordinasi dengan Pertamina terkait Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR yang bersumber dari pengusaha SPBU yang ada di Kabupaten Sleman," ujarnya.

Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo dalam pandangan akhirnya berharap melalui tiga Raperda yang telah disahkan menjadi Perda ini Pemkab Sleman dapat menyusun kebijakan-kebijakan yang semakin aspiratif berdasarkan kondisi atas permasalahan yang berkembang di masyarakat. **(Has)-f**

KR-Istimewa

*Ketua DPRD Sleman Haris Sugiharta menandatangani Perda disaksikan Bupati Kustini, Wabup Danang Maharsa dan pimpinan dewan.*

GP ANSOR DAN FATAYAT NU TEMPEL

# Gelar Pendidikan Dasar Banser dan Garfa

**TEMPEL (KR)** - Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) dan Fatayat NU Kabupaten Sleman melalui Pimpinan Anak Cabang Tempel menggelar Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar) Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dan Diklat Terpadu Dasar (DTD) Garda Fatayat (Garfa) di Lapangan Kalurahan Sumberrejo Tempel, 22-24 Desember lalu.

Diklatsar diikuti 60 peserta yang terdiri dari 45 peserta Diklatsar Banser dan 15 pesta DTD Garfa dari berbagai latar belakang. Kegiatan tersebut merupakan Diklatsar Banser ke XXIX dan Diklat Terpadu Dasar Garfa ke-II dengan tema 'Dengan Semangat Sinergitas Membentuk Kader Militan yang berkualitas'.

KR-Istimewa

*Para peserta Diklatsar Banser saat longmarch melewati medan persawahan.*

Ketua Panitia Wahyu Ari Wibowo, Senin (25/12) mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan sebagai sarana pendidikan dasar untuk menjadi seorang Banser dan Garfa demi menciptakan kepribadian yang tangguh dan mempunyai semangat bela negara. "Kami ingin membentuk kader yang militan dan tangguh, dapat menjaga Kyai, menjaga Kejayaan Nahdlatul Ulama, dan tentunya memiliki kepribadian kuat untuk menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya.

Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Kabupaten Sleman Dr Arianto Nugroho mengapresiasi penyelenggaraan Diklatsar Banser dan DTD Garfa tersebut, **(Yud)-f**

BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN SLEMAN

# Propemperda Tahun 2024 Rencananya 10 Raperda

**SLEMAN (KR)** - Sebanyak 10 rancangan Peraturan Daerah (Raperda) direncanakan masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2024. Dari jumlah tersebut, 7 di antaranya merupakan raperda yang belum disetujui untuk ditetapkan pada Tahun 2023 ini.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Sleman Respati Agus Sasangka SIP mengatakan, rencana Propemperda 2024 meliputi Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan, Kawasan Tanpa Rokok, Penyelenggaraan Metrologi, Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Kalurahan, Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekusor Narkotika (P4GN). Kemudian Pendidikan Karakter, Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Nonformal Lainnya. Selanjutnya raperda pencegahan dan penanggulangan stunting, Raperda Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Raperda Badan Keswadayaan Masyarakat.

"Totalnya ada 10 raperda yang rencananya masuk dalam Propemperda Tahun 2024 nanti," kata Respati usia rapat Bapemperda, Rabu (27/12) di DPRD Kabupaten Sleman.

Menurut Ade, panggilan akrabnya, dari 10 raperda itu 7 diantaranya raperda yang belum ditetapkan pada Tahun 2023 ini. Sehingga menjadi PR yang harus diselesaikan pada Tahun 2024 mendatang. "Sebenarnya dari 7 raperda itu, 3 raperda sudah setuju ditetapkan. Namun karena proses fasilitasi Gubernur DIY maksimal 30 November 2023, sedangkan 3 raperda baru ditetapkan kemarin sehingga untuk proses tahapan fasilitasi harus masuk dalam Propemperda 2024," terang Ketua Fraksi PAN ini.

KR-Istimewa

*Bapemperda menggelar rapat konsultasi untuk membahas propemperda Tahun 2024.*

Dengan pembatasan waktu fasilitasi tersebut, dari 15 raperda yang masuk Propemperda Tahun 2023 baru 8 raperda yang sudah disetujui untuk ditetapkan. Berdasarkan Permendagri No.80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, bahwa jumlah propemperda yang diizinkan adalah realisasi raperda tahun sebelumnya ditambah 25 persen dari realisasi. "Karena tahun ini hanya 8 raperda yang terealisasi, jadi Propemperda Tahun 2024 hanya 10 raperda saja," terangnya.

Di samping 10 raperda itu, Bapemperda rencananya juga membahas 3 raperda kumulatif terbuka. Yakni Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

"Jadi selain 10 raperda, masih ada 3 raperda kumulatif terbuka," tuturnya.

Sedangkan raperda yang di luar 'PR' tahun 2023, yakni raperda pencegahan dan penanggulangan stunting, Raperda Badan Keswadayaan Masyarakat, serta Raperda Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan usulan dari masyarakat. Raperda pencegahan dan penanggulangan stunting cukup penting karena angka stunting di Kabupaten Sleman cukup tinggi.

"Angka stunting di Sleman masih signifikan. Jadi raperda ini untuk mempercepat penyelesaian stunting di Sleman karena ini menyangkut generasi emas tahun 2045 mendatang. Harapannya generasi yang lahir dalam kondisi prima dan bebas stunting," terang anggota dewan dari Dapil Mlati-Gamping ini.

Untuk raperda Badan Keswadayaan Masyarakat, bahwa saat ini masih ada 75 kalurahan yang masih memiliki badan keswadayaan masyarakat. Faktanya badan keswadayaan masyarakat tersebut belum memiliki payung hukum, padahal memiliki aset besar dan lembaganya masih eksis. "Badan keswadayaan masyarakat ini dulunya kelanjutan program PNPM Mandiri Perkotaan. Tapi badan ini belum ada payung hukumnya, makanya kami buatkan raperdanya," jelasnya.

Sedangkan untuk Raperda Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini untuk melindungi para pekerja migran. Hal itu untuk memastikan hak-hak hukum para pekerja migra terpenuhi, baik pemberangkatannya legal, di luar negeri aman dan pulang juga produktif.

KR-Istimewa

*Respati Agus Sasangka SIP*

"Mereka bekerja ke luar negeri orientasinya memperbaiki ekonomi sehingga perlu ada pendampingan dan perlindungan. Harapan kami, mereka terlindungi mulai dari berangkat, diluar negeri aman dan pulang masih tetap produktif," pungkasnya. **(Sni)-f**